

# **ANALISIS KINERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI 2016**

(Studi Kasus : Dalam Melaksanakan Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Oleh : Diajeng Ani Hafizah

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

## **Abstrak**

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi yang besar pada sektor pertanian. Untuk mendukung sektor ini, orientasi pengembangan sektor pertanian adalah dengan mengembangkan komoditi berbasis lokal, mengembangkan sektor produksi, pengembangan kawasan sektor pertumbuhan, dan melanjutkan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian. Khususnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan salah satu lumbung pangan provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan kejadian alih fungsi lahan sawah tertinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Menjalankan Program LP2B. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu Observasi Langsung, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti khususnya tentang kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dalam realisasinya berdasarkan hasil penelitian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berperan sebagai inisiator, fasilitator dan berupaya meningkatkan produktifitas dan ketahanan pangan bagi masyarakat khususnya petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Serta mendorong masyarakat dan petani untuk menjadi masyarakat yang mandiri dalam bidang pertanian agar konsisten untuk mempertahankan lahan agar tidak di alih fungsikan, walaupun belum bisa berjalan dengan optimal karena terkendala oleh sarana dan prasarana yang mendukung dan SDM yang belum mumpuni.

Adapun dilihat dari aspek tanggung jawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada baik dalam penyusunan anggaran maupun dalam upaya mewujudkan *good governance*, Berdasarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi aspek kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ada di dinas tersebut sudah cukup efektif.

*Kata Kunci: Kinerja, Kebijakan, Lahan Pertanian*

## **A. Pendahuluan**

Keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialih fungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Permasalahan ini menuntut Negara yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hak atas pangan.<sup>1</sup>

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu

---

<sup>1</sup> Dr. Ir. Gatot M.S., DAA, *Lahan dan Kedaulatan Pangan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 37

peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi Kabupaten/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.<sup>2</sup>

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi yang besar pada sektor pertanian. Untuk mendukung sektor ini, orientasi pengembangan sektor pertanian adalah dengan mengembangkan komoditi berbasis lokal, mengembangkan sektor produksi, pengembangan kawasan sektor pertumbuhan, dan melanjutkan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian. Khususnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Hampir semua wilayah di Provinsi Jambi mengalami alihfungsi lahan sawah menjadi penggunaan lain. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan salah satu lumbung pangan provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan kejadian alihfungsi lahan sawah tertinggi.<sup>3</sup> Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu

---

<sup>2</sup> Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Data Hasil Ukur LP2B Tanjung Jabung Timur, Diakses dari <http://dispertan.tanjabtinkab.go.id/>, Tanggal 27 September 2016, Pukul 19:02 WIB

<sup>3</sup> Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Diakses dari <http://dispertan.tanjabtinkab.go.id/>, Tanggal 27 September 2016, Pukul 19:32 WIB

lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting sebagai pelayanan publik khususnya dibidang pertanian dan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berhasil atau tidaknya kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas maupun programnya sangat ditentukan sejauh mana organisasi tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang secara efektif melaksanakan program-program kerjanya.

Penelitian ini mengangkat judul mengenai analisis kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan program lahan pertanian pangan dan berkelanjutan tahun 2016, agar dapat diketahui hasil dari program lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dijalankan Dinas tersebut. Apakah memberikan perubahan yang positif atau negatif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan perlindungan lahan pertanian yang di alih fungsikan, dan;
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **D. Kerangka Dasar Teori**

Dalam menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan kerangka dasar teori, kerangka dasar teori yang dimaksud disini diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.<sup>4</sup> Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh

---

<sup>4</sup>Masri singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989, Hal.21.

selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>5</sup> Didalam penelitian ini di gunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, yakni:

## **1. Pemerintah Daerah**

### 1.1 Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah:

Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lainnya yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah).

### 1.2 Pemerintahan Pusat

Pengertian Pemerintahan Pusat adalah Pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hubungan dalam fungsi pemerintahan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah dilaksanakan dengan sistem Otonomi, dalam sistem otonomi ini dikenal dengan adanya

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, Hal.65.

desentralisasi, dekosentrasi dan juga tugas pembantuan. Hubungan ini memiliki sifat koordinatif administratif, yang artinya hakikat fungsi pemerintahan ini tidak ada yang saling membawahi, agar terjadinya harmonisasi antara daerah maupun pusat.

Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan Gubernur,bupati/walikota ialah pemegang kekuasaan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Dalam ajaran “Trias Politica” yang dikemukakan oleh Montesque, dimana kekuasaan pemerintahan terpisah atas kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan juga kekuasaan Yudikatif.Namun berbeda dengan sistem Pemerintahan di Indonesia, di Indonesia sendiri tidaklah menerapkan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi adanya sistem pembagian kekuasaan yang dapat diimplementasikan dalam:

- a. Kekuasaan Eksekutif yang dilakukan oleh presiden RI beserta wakil presiden dan mentri-mentrinnya.
- b. Kekuasaan Legislatif yaitu dalam membuat peraturan yang dikenal dengan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Kekuasaan Yudikatif yaitu dalam bidang peradilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta perangkatperangkatnya di daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

<sup>7</sup> Montesquieu, *THE SPIRIT OF LAW (Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik)*, Nusamedia, 2011.

## 2. Kinerja Organisasi

### 2.1 Pengertian Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka disimpulkan bahwa kinerja Sumber Daya Manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai Sumber Daya Manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut A. A. Prabu Mangkunegara dalam bukunya *Evaluasi Kinerja SDM*, manajemen kinerja merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya langsung. Selanjutnya A. A. Prabu Mangkunegara mengemukakan tujuan dari pelaksanaan manajemen kinerja, bagi para pimpinan dan manajer adalah :

---

<sup>8</sup> Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 67



- a. Mengurangi keterlibatan dalam semua hal;
- b. Menghemat waktu, karena para pegawai dapat mengambil berbagai keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang benar.
- c. Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman diantara pegawai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab.
- d. Mengurangi frekuensi situasi dimana atasan tidak memiliki informasi pada saat dibutuhkan.
- e. Pegawai mampu memperbaiki kesalahannya dan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kesalahan atau inefisiensi.

Adapun tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi para pegawai adalah :

- a. Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan serta memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan;
- b. Membarikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru;
- c. Mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai;

d. Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggungjawab kerja mereka.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi dan tujuan-tujuan yang dikemukakan oleh Mangkunegara, maka manajemen kinerja adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian kerja para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam tujuan Mangkunegara berbicara tentang bagaimana adanya pemahaman antara pimpinan dan bawahan dalam menyelesaikan, mengambil keputusan dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan tanggung jawab.

Kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan, sebuah organisasi dapat terbentuk karena

---

<sup>9</sup> Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 20

<sup>10</sup> Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta : Gava Media, 2004, hlm. 193

dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama.<sup>11</sup>

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain :

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

---

<sup>11</sup> Armosudiro, *Konsep Organisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>12</sup> Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: PT Reflika Aditama, Hlm.7.

#### b. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai, hal tersebut erat kaitannya dengan Rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

#### c. Keadilan

Mempertanyakan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik, kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepastasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi, isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pingiran dan sebagainya, akan mampu dijawab oleh kriteria ini.

#### d. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau Pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006 Hlm. 52

Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu. Menurut Agus Dwiyanto penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas.<sup>14</sup>

Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya memiliki *stakeholder* yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lain yang menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda.

Agus Dwiyanto mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada

---

<sup>14</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006 Hlm. 49

umumnyadipahami sebagai rasio antara input dengan output. KonsepProduktifitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *GeneralAccountingOffice* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuranproduktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

c. Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjukan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kineja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki Responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. **Responsibilitas**

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. **Akuntabilitas**

Menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat diguna untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau Pemerintah, seperti pencapaian target. kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam

masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas kepuasan pelanggan (jasa) yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman<sup>16</sup> meliputi 10 dimensi, yaitu:

a. Tangibles

Keberadaan fisik pemberi pelayanan, meliputi tempat parkir, fasilitas gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan modern.

b. Reliability

Mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanan (jasa) nya secara tepat sejak saat pertama (right in the first time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya.

c. Responsiveness

---

<sup>15</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006 Hlm. 50

<sup>16</sup> Parasuraman, Valarie A. Z. And Berry. *Delivering Service Quality*. Mc Milan, New York, 2002, Hlm. 21



Pelayanan yang baik harus disertai dengan tingkat keikutsertaan / keterlibatan dan daya adaptasi yang tinggi, yaitu membantu dengan segera memecahkan masalah.

d. Competence

Pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kecakapan/keterampilan yang tinggi.

e. Access

Meliputi memberikan/menyediakan keinginan pelanggan dan pelayanan yang mudah dihubungi.

f. Courtesy

Pelayanan yang baik harus disertai dengan sikap keramahan, kesopanan kepada pihak yang dilayani.

g. Communication

Pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak yang dilayani.

h. Credibility

Pelayanan yang baik harus dapat memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada pihak yang dilayani.

i. Security

Pelayanan yang baik harus memberikan rasa aman kepada pihak yang dilayani dan membebaskan dari segala resiko atau keraguan pelanggan.

j. Understanding The Customer

Pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kemampuan menanggapi atau rasa pengertian kepada keinginan pihak yang dilayani.

2.2 Pengertian Program Kerja

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita organisasi. Ada dua alasan pokok mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi :

a. Efisiensi organisasi

Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat.

b. Efektifitas organisasi

Keefektifan Organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.

### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan narasumber Kepala Kantor dan staf. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu guna mengetahui program atau kebijakan apa saja yang telah di buat guna mengantisipasi dan mengurangi alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisis dilakukan selama dilapangan dan setelah penelitian berakhir. Data dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **F. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan undang-undang No.54 Tahun 1999 undang-undang No.14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 km<sup>2</sup> atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (termasuk pulau Berhala, 11 diantaranya belum bernama) menjadi 13.102,25 km<sup>2</sup>. Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Terkait dengan masalah lahan yang di alih fungsikan, pada tahun 2013 terdapat berbagai isu dan kekhawatiran oleh masyarakat terkait dengan kondisi lahan tidur (*Sleeping Line*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti semakin banyaknya lahan yang di alih fungsikan yang awalnya untuk lahan sawah menjadi lahan kebun atau lahan bangunan. Penanganan alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pada dasarnya memerlukan koordinasi dengan pihak pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya mengatasi masalah tersebut dengan membuat peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki dasar hukum yang digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan tugas dan fungsi dinas tersebut, dasar hukum

yang digunakan akan disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing dinas di setiap Kabupaten atau Kota.

Dari aspek produktivitas di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari target dan realisasi program-program sesuai dengan rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Untuk realisasi program dalam mengatasi alih fungsi lahan terdapat tiga program yang di selenggarakan yaitu Sosialisasi Pentingnya Lahan Sawah, Pemberian Insentif Kepada Para petani, dan Pelatihan Manajemen Jual Beli dan Pemanfaatan Lahan, dari ketiga program tersebut semua program tercapai dengan hasil 85% karena terdapat kendala dalam pemberian insentif kepada para petani karena dalam pemberian mesin traktor untuk 9 kecamatan hanya terealisasikan sebanyak 8 unit saja dikarenakan terjadinya kendala dana pada saat berjalannya program tersebut setelah peneliti konfirmasi kepada pihak Dinas. Selanjutnya kendala terjadi pada program pelatihan manajemen jual beli dan pemanfaatan lahan karena dalam program tersebut masih ada sebagian peserta yang kurang memahami pembekalan materi tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan minimnya pendidikan dari perindividu itu sendiri.

untuk pencapaian kesesuaian hasil dengan target dapat disimpulkan bahwa pencapaian sudah berhasil karena pihak dinas mengatakan bahwa

persentase hasil yang didapat sudah hampir masuk dalam kategori berhasil sesuai target yang diinginkan, hal ini ternyata benar-benar direalisasikan dengan berbagai bentuk kebijakan dan program Pembangunan Bidang Pertanian dan dituangkan dalam konsepsi kebijakan seperti meningkatnya produktivitas komoditi pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan kehutanan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta tersebar di kawasan sentra produksi. Selain itu, Pemkab Tanjung Jabung Timur juga merupakan kabupaten pertama se-Provinsi Jambi yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal tersebut merupakan wujud dari keseriusan Pemkab dalam rangka mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 17.000 Ha dan lahan cadangan pangan seluas paling kurang 4.000 Ha.

Dari aspek kualitas pelayanan terdapat tiga bagian didalamnya yaitu tangibles (bukti fisik), responsibilitas dan access (menyediakan layanan yang mudah untuk dihubungi). Untuk aspek tangibles dalam bukti fisik penyedia layanan yaitu menyediakan lahan parkir yang luas, lokasi parkir yang digunakanpun mampu menampung 25 unit kendaraan roda dua dan 3 unit kendaraan roda empat, namun masih belum cukup luas untuk menampung kendaraan roda dua yang diketahui banyak pegawai yang memakai kendaraan roda dua tersebut. Untuk aspek fasilitas gedung sendiri pihak dinas

mengatakan bahwa dinas ini memiliki fasilitas gedung yang memadai namun perlu adanya tambahan barang seperti sofa untuk kenyamanan para pegawai. Untuk aspek tata letak dan tampilan barang juga sudah cukup memuaskan karena sudah terlihat rapi dan sederhana. Untuk aspek kenyamanan fasilitas fisik juga sudah cukup terpenuhi. Dan terakhir untuk aspek peralatan dan perlengkapan modern pun didapatkan informasi bahwa adanya komputer, printer, faxmail dan lain-lain pada dinas tersebut sudah cukup memadai dan dapat digunakan oleh pegawai Dinas tersebut.

Terkait dengan aspek tanggung jawab Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari adanya rencana strategis untuk pedoman/landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan aparaturnya untuk menyusun rencana kerja (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) serta tersedianya rumusan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman serta tolak ukur dalam penilaian dan akuntabilitas kinerja SKPD yang bersangkutan di dalam mewujudkan visi dan misi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, mengenai kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini juga didukung keterangan dari Bapak Harsono, yang menyatakan dalam setiap kebijakan atau program kegiatan yang dilakukan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dasar dan perencanaan, pelaksanaan kebijakan.<sup>17</sup>

Menurut penulis, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan prinsip responsibilitas dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada baik dalam penyusunan anggaran maupun dalam upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai aparatur yang membantu Kepala Daerah di bidang Pertanian dan Tanaman Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa kelima faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ini sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur yang menjalankan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, dimana

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Harsomo selaku Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.



tanpa adanya faktor ini program tidak akan bisa berjalan sesuai target yang ingin dicapai.

## **G. Penutup**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek produktivitas penulis melihat bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah produktif dalam melaksanakan tugasnya hanya saja masih terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dilihat dari kurang efektifnya kebijakan yang di berlakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap masyarakat karena hal ini sebagaimana yang terdapat dilapangan, dalam masyarakat masih ada kurangnya pemerataan distribusi sarana dan prasana berupa pendukung pelaksanaan dari LP2B sehingga hal ini yang membuat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur membutuhkan waktu yang jangka panjang dalam melakukan kinerja berupa program-program yang dilakukan kepada masyarakat untuk mendukung program LP2B sehingga dengan demikian masih butuh waktu penyesuaian adaptasi terhadap kondisi dilapangan yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

2. Dilihat dari aspek kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada aspek prosedural yang dilakukan langsung dikantor dinas tersebut penulis melihat bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik namun belum maksimal karena ada beberapa sarana dan prasarana yang belum mendukung dengan baik dalam kinerja yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada bukti fisik (tangibles) diantaranya tempat parkir, fasilitas gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan modern yang belum mumpuni sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam aspek pelayanan yang diberikan belum maksimal kepada masyarakat, dan juga pada aspek akses atau pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah cukup mudah dan itu merupakan pola koordinasi dan komunikasi yang dilakukan baik secara konvensional.

3. Dilihat dari aspek tanggung jawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada baik dalam penyusunan anggaran maupun dalam upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai aparaturnya yang membantu Kepala Daerah di bidang Pertanian dan Tanaman Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta dalam rangka mewujudkan good governance.

4. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi aspek kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ada di dinas tersebut sudah cukup efektif namun masih memiliki kekurangan di beberapa lini seperti SDM dari masyarakat petani yang beberapa masih sulit untuk memahami dan memupuk etos kerja dalam mengikuti program LP2B ini, yang kedua dari aspek kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah cukup baik karena beberapa peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh dinas kepada masyarakat dalam mendukung LP2B yang menjadi salah satu program sudah terlaksana dengan baik karena beberapa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dinas kepada masyarakat dilakukan secara pendekatan yang efektif dan efisien. Selanjutnya pada sistem informasi manajemen sudah dilakukan beberapa inovasi-inovasi baik yang ada di dinas tersebut maupun di akses melalui webmail.

## **A. Saran-Saran**

Dengan melihat hasil yang diupayakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Untuk keberhasilan pelaksanaan Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, maka penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura harus selalu konsisten dalam menjalankan program Lahan pertanian pangan berkelanjutan secara maksimal.
2. Pencegahan pemberian izin alih fungsi LP2B oleh SKPD Kab/Kota yang menangani perizinan dengan diterbitkannya Pergub atau Perbub tentang Alih Fungsi Lahan Sawah.
3. Meningkatkan pengawasan dan kemampuan personil lapangan agar lebih bisa ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Bungin, Burham. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Danim, Sudarwan. (2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gatot. (2016). *Lahan dan Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hafidz. (2007). *Monitoring dan Evaluasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irianto, Gatot. (2014). *Menuju Indonesia Berdaulat Pangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ivandevich. (1992). *Human Resources Managemen., USA: Foundations Of Personel*.
- Koentjaraningrat. (1990). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Kusnati, Retno. (2010). *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkunegara. (2005). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusi*. Bandung:Refika Aditama.
- Moleong, J Lexy. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prawirosentono. (2007). *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prijambodo. (2015). *Monitoring dan Evaluas*. Bandung: IPB Press.
- Pusat Bahasa Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahadyan, Ahmad. (2016). *SAMUDRA (Tanjung Jabung Timur Dalam Majalah)*. Jambi: Panota Grup.
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofyan. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

- Sunyoto. (1999). *Kualitas Kinerja Aparatur (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surahmad, Winarno. (1987). *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Tangkilisan, Msi. Drs. Hessel Nogi S. (2003). “*Teori dan Konsep Kebijakan Publik*”  
*dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta :  
Lukman Offset dan YPAPI.
- Tim Penyusun. (2007). *Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Waridah DKK, Siti. (2001). *Sosiologi2*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusi*. Jakarta: Salemba Empat.

#### **Referensi Jurnal :**

- Sukowati, Kurniawan. (2010). *Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen*. Tesis Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret.

#### **Referensi Undang-Undang :**

Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013, Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan daerah No 01 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

#### **Referensi Internet :**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Data Hasil Ukur LP2B Tanjung Jabung Timur, Diakses dari <http://dispertan.tanjabtimgab.go.id/>, Tanggal 27 September 2016, Pukul 19:02 WIB

Hj. Asnelly Ridha Daulay, Dalam penelitian untuk kandidat doktor pada program studi sumber daya alam dan lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Senin 04 Juli 2016. Diakses dari <file:///C:/Users/WINDOWS/Documents/SKRIPSI/INFO%20JAMBI>

[% 20 % 20BERITA% 20JAMBI% 20HARI% 20INI% 20 % 20Selalu% 20y  
ang% 20Pertama% 20-  
% 20Alihfungsi% 20Lahan% 20Sawah% 3b% 20Saatnya% 20Petani% 20  
Memiliki% 20Bargaining% 20Power.htm](#) Tanggal 28 September 2016, Pukul  
20:17 WIB